

Diterima: [Oktober 23, 2024]

Direvisi: [Oktober 25, 2025]

Diterbitkan: [July 29, 2026]

Article type: [Research Article] | Subject area: [Political Science] | Running title: [Compromise in NasDem Party Institutionalization]

MENGAJUKAN PENTINGNYA KOMPONEN “KEMAMPUAN KOMPROMI” DALAM DIMENSI PELEMBAGAAN: SEBUAH STUDI TERHADAP PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

Ujang Babas¹, Cecep Hidayat²¹Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia²Departemen Ilmu Politik, Universitas Indonesia*Corresponding author: ujang.babas@ui.ac.id

ABSTRACT

There is a debate about which dimension is most decisive in party institutionalization. Party institutionalization can first be seen from the increase in votes as an early indication. In the case of the 2014 to 2019 elections in Indonesia, the party that has seen the largest increase in votes is the NasDem Party, indicating that the party is the most institutionalized. This paper aims to examine the institutionalization of the NasDem Party. The method used is qualitative, by analyzing the empirical case of the NasDem Party. The result is that there is a dilemma in the debate on the concept of party institutionalization, and the stability of the NasDem Party's vote is relatively influenced by the organizational dimension, especially the strength of membership. Although the coherence of members seems problematic, the strength of members has contributed to the benefit of party votes. The "Ability to Compromise" component is important to be proposed as a prerequisite for balancing between dimensions of party institutionalization.

Keywords: *Party Institutionalization, NasDem Party, "Ability to Compromise"*

ABSTRAK

Terdapat perdebatan tentang dimensi mana yang paling menentukan dalam pelebagaan partai. Terlembaganya partai mula-mula dapat dilihat dari perolehan suara yang mengalami peningkatan sebagai indikasi awal. Dalam kasus Pemilu 2014 ke Pemilu 2019 di Indonesia, partai yang terlihat paling besar mengalami peningkatan suara adalah Partai NasDem, mengindikasikan partai tersebut paling terlembaga. Tulisan ini bertujuan memeriksa pelebagaan Partai NasDem. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan menganalisis kasus empiris Partai NasDem. Hasilnya terdapat sebuah dilema di dalam perdebatan konsep pelebagaan partai, dan stabilitas perolehan suara Partai NasDem relatif dipengaruhi dimensi keorganisasian khususnya pada kekuatan keanggotaan. Meskipun koherensi anggota terlihat bermasalah, namun kekuatan anggota telah berkontribusi untuk kepentingan suara partai. Komponen “Kemampuan Kompromi” menjadi penting untuk diajukan sebagai prasyarat menyeimbangkan antar dimensi pelebagaan partai.

Kata Kunci: *Pelebagaan Partai, Partai NasDem, “Kemampuan Kompromi”*

DOI: <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v9i1.19292>

Lisensi: CC BY-SA 4.0

RESEARCH HIGHLIGHTS

[Proposes "ability to compromise" to balance party institutionalization dimensions]

I. PENDAHULUAN

Selama era reformasi perolehan suara partai politik di Indonesia menunjukkan perolehan suara yang variatif (Data BPS, 2019; Thoha, 2017). Variatif perolehan suara menunjukkan terdapatnya pergeseran pemilih dari satu partai ke partai lain dan dari satu periode pemilu ke periode pemilu berikutnya (S. Mainwaring & Su, 2021). Di Indonesia pergeseran pemilih tersebut masih dipengaruhi oleh sosok personal. Personalisasi menjadi penting untuk mengukur

tingkat pelembagaan partai politik (S. Mainwaring & Torcal, 2005). Satu sisi personalisasi yang kuat membuat sebagian besar kepentingan partai menjadi tidak bertumpu pada Pelembagaan. Di sisi lain kekuatan personal telah memberikan manfaat untuk kestabilan partai.

Tabel 1. Perolehan Suara Partai Politik Periode Pemilu 2014 – 2019

Partai	2014	2019	Selisih
PDIP	18,96	19,33	0,37
GolKar	14,75	12,31	2,44
PKB	9,04	9,69	0,65
PKS	6,77	8,21	1,44
PAN	7,57	6,84	-0,73
PPP	6,53	4,52	-2,01
PBB	1,46	0,79	-0,46
PKPI	0,91	0,22	-0,69
Demokr t	10,19	7,77	-2,42
Hanura	5,27	1,54	-3,73
Gerindra	11,81	12,57	0,76
NasDem	6,74	9,05	2,31

Sumber: data KPU RI tahun 1999-2024

Partai politik dengan peningkatan paling tinggi dalam kurun waktu Pemilu 2014 ke Pemilu 2019 adalah Partai NasDem. Perolehan suara Partai NasDem tercatat dari 6,74% pada 2014 menjadi 9,05% pada Pemilu 2019, mengindikasikan bahwa Partai NasDem adalah partai yang paling terlembaga pada periode tersebut. Namun Partai NasDem masih menunjukkan terdapatnya permasalahan baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, pada indikator kekuatan keanggotaan memang berpengaruh terhadap stabilitas perolehan suara. Di sisi lain masih terdapat adanya anggota yang terlihat kurang ter-institusionalisasi. Pada dimensi koherensi masih terdapat anggota yang tidak sejalan dengan keputusan partai dan melakukan pembangkangan. Sedangkan secara eksternal, partai yang relatif baru ini belum memiliki akar sosial yang kuat dan masih terdapatnya permasalahan pada dimensi otonomi. Permasalahan dimensi otonomi ini dipengaruhi oleh personalisasi di dalam partai.

Pengalaman Partai NasDem telah merefleksikan perdebatan tentang dimensi-dimensi di dalam pelembagaan partai. Sebagian kalangan sarjana menekankan pada dimensi yang satu, dan sebagian lagi menekankan pada dimensi yang lain. Ketidakpastian timbul seperti pendapat bahwa, partai mungkin sangat terlembaga di satu dimensi namun saat yang bersamaan kurang terlembaga pada dimensi yang lain (Levitsky, 1988:641). Hal tersebut menjadi sebuah dilema sehingga menginspirasi penulis untuk mencoba mengajukan komponen penting di dalam pelembagaan yang belum secara tegas dibahas oleh sarjana-sarjana sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Huntington (1968) pelembagaan adalah proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan stabilitas. Stabilitas merupakan bagian dari pelembagaan partai politik (Huntington, 1968; Janda, 1980a; Kuenzi & Lambright, 2001). Tingkat pelembagaan yang rendah menghasilkan ketidakstabilan politik, begitupun sebaliknya. Tingkat pelembagaan sistem politik apapun dapat ditentukan oleh kemampuan beradaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi organisasi dan prosedurnya. Semakin kuat pelembagaan suatu organisasi maka keempat dimensi pelembagaan tersebut akan menunjukkan tingkat yang menguat dan semakin

pelembagaan melemah maka akan menghasilkan dimensi-dimensi yang melemah (Huntington, 1968, hal. 13–18).

Harus diakui bahwa Huntington telah banyak memberikan inspirasi tentang konsep pelembagaan. Hal itu karena konsepsi pelembagaan telah banyak diadopsi oleh para sarjana. Mainwaring dan Scully (1995) misalnya, yang memaknai pelembagaan pada dua poin penting yaitu kemapanan dan penerimaan. Dari segi waktu ke waktu, kemapanan dapat ditunjukkan dengan kemampuan partai untuk bertahan memperoleh suara yang stabil.

Pelembagaan partai yang bermasalah dinilai mengganggu proses konsolidasi demokrasi oleh karena partai politik memiliki peran penting dalam proses tersebut (Kopecký, 1995). Dalam proses menjadikan partai agar lebih terlembaga terjadi negosiasi antarelit yang tergabung dalam formasi politik (Gherghina, 2015). Huntington menulis tentang pelembagaan dalam konteks sistem politik (Huntington, 1968). Mainwaring dan Scully (S. P. Mainwaring & Scully, 1995:78) menekankan pelembagaan pada stabilitas. Sementara ada juga yang menekankan pada apa yang disebut sebagai value infusion (Levitsky, 1988; Selznick, 1997). Stabilitas dan Nilai dalam pelembagaan dapat didefinisikan dengan kemampuan adaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi (Huntington, 1968:12).

Stabilitas partai politik yang dimaksud mencakup banyak hal seperti: Mainwaring dan Scully yang telah berbicara dalam konteks keberlangsungan partai, dukungan terhadap partai (Rose dan Urwin dalam Drummond, 2006); akar dalam masyarakat (S. Mainwaring & Torcal, 2005); perpindahan pemilih (Mair, 2008:43); basis dukungan, keanggotaan yang luas dan tersebar (Bollevier dan Bytze; Tavits; Carter dalam Rybář & Spáč, 2020).

Dari segi nilai atau dengan kata lain ‘value infusion’ (Huntington, 1968; Levitsky, 1988; Selznick, 1997), pelembagaan terjadi saat partai mendapatkan nilai melebihi persyaratan teknis dari tugas yang ada (Levitsky, 1988 dalam Selznick, 1997), atau ketika tujuan para aktor bergeser dari mengejar tujuan pribadi menjadi tujuan untuk melanggengkan organisasi partai (Levitsky, 1988:79). Mengacu pada Selznick (1997:5) partai yang tidak terlembaga dipandang oleh anggotanya hanya sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan yang dapat ditinggalkan kapanpun. Mainwaring & Torcal (2005:5) mengilustrasikan partai yang lebih terlembaga tidak tunduk pada beberapa pemimpin yang ambisius, mereka memperoleh independensi nilai mereka sendiri.

Pelembagaan partai yang diargumentasikan oleh Neumann 1956; Key 1964; Borre dan Katz 1973; Rosenstone dan Hansen 1993; Dalton dan Wattenberg; 2000 (S. P. Mainwaring & Scully, 1995) dimana pelembagaan partai adalah kemampuan menghasilkan simbol identifikasi dan kesetiaan. Kemudian, Converse (1969) telah memodifikasi argumen beberapa scholar tersebut dengan meletakkan simbol identifikasi dan kesetiaan sebagai yang dapat menciptakan kesinambungan dalam pemilu (S. P. Mainwaring & Scully, 1995). Penarikan konsep pelembagaan ke dalam partai politik (sebagai organisasi) disederhanakan oleh North (1993:11-12) dimana lembaga adalah aturan permainan dan organisasi adalah pemainnya.

Sebelumnya, pelembagaan pada poin kemampuan adaptabilitas telah dikonsepsikan oleh Kirchheimer (1966) dalam Mainwaring (1995), yang ditarik ke dalam partai. Dalam hal ini adaptabilitas dalam pelembagaan partai dianggap sebagai aktor rasional yang bereaksi dan menyesuaikan diri dengan kendala dan peluang yang disediakan oleh pasar elektoral. Konsepsi ini jelas mendukung poin pertama dalam pelembagaan yang Huntington sebutkan.

Perkembangan konsepsi pelembagaan partai politik selanjutnya dilakukan oleh Rae (1971), Harmel dan Janda (1982) yang berargumen bahwa partai politik dipengaruhi oleh keorganisasian mereka, posisi ideologis, keanggotaan, dan usulan kebijakan oleh organisasi negara, jenis pemerintahan (yaitu sistem presidensial vs parlementer), sistem pemilu, pengalaman demokrasi, dan oleh Sartori (1976;1994) dalam Mainwaring & Scully (1995) hukum pemilu. Dimensi-dimensi tersebut jelas dapat dibedakan menjadi dimensi internal partai

dan eksternal partai. Bagian ini dapat dikelompokkan oleh Randal dan Svasand (2002) menjadi bagian dimensi Kesisteman, Otonomi, dan 'Infus Nilai'.

Namun berbeda dengan yang diargumentasikan oleh Mainwaring (1995), dalam hal otonomi, partai tidak hanya dapat bergantung pada kebijakan negara, jenis pemerintahan, sistem pemilu, dan hukum pemilu. Bagi Mainwaring partai juga dapat sangat bergantung pada suara, mereka berkepentingan untuk menyatu dengan pendapat warga. Akibatnya, mereka cenderung sensitif terhadap pesan pemilih. Ketergantungan pada opini publik menunjukkan otonomi yang lemah.

Sedangkan Panebianco telah memilih dua kriteria dalam mengukur pelebagaan partai politik, tingkat otonomi vis a vis lingkungannya dan tingkat kesisteman (Randall & Svåsand, 2002:9). Argumentasi Panebianco adalah pelebagaan partai politik adalah proses suatu organisasi memperkokoh dirinya (Randall & Svåsand, 2002:10). Dia mengakui bahwa antara Otonomi dan Kesisteman pada praktiknya akan saling terkait. Namun, Panebianco menyarankan bahwa tingkat pelebagaan (otonomi dan kesisteman) partai yang tinggi sebenarnya dapat menghambat fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi (Randall & Svåsand, 2002). Dengan kata lain, Panebianco memberi ruang opsi bagi tingkat pelebagaan partai apakah akan mengesampingkan kemampuan adaptabilitas dalam pelebagaan partai atau tingkat otonomi dan kesisteman yang disesuaikan dengan budaya politik dan kepemiluan.

Levitsky (1988) yang merujuk pada Philip Selznick (1997) melihat ada celah yang luput dari dilema tingkat pelebagaan partai yang tinggi dengan kemampuan adaptasi. Dia mengajukan adanya 'Infus Nilai' dalam pelebagaan partai. Argumentasinya adalah pelebagaan partai ketika suatu organisasi menjadi diresapi dengan nilai di luar persyaratan tugas teknis. Namun seperti konsepsi ini diilhami oleh pendapat Panebianco yang berbicara tentang bagaimana keorganisasian menjadi berharga di dalam dan dari dirinya sendiri (Randall & Svåsand, 2002:10). Panebianco menambahkan hal tersebut perlu dilakukannya penetrasi, semakin besar unsur penetrasi (dari tingkat pusat ke tingkat daerah) semakin kuat suatu pelebagaan partai (Randall & Svåsand, 2002:12). Apa yang dimaksud oleh Panebianco adalah kemampuan partai melakukan penetrasi nilai-nilai yang disepakati terhadap para anggota partai.

Levitsky sendiri menyarankan bahwa otonomi tidak diperlukan untuk pelebagaan, setidaknya dalam arti difusi (penyebaran) nilai (Randall & Svåsand, 2002:8). Didukung oleh Kenneth Janda yang mendefinisikan pelebagaan partai adalah salah satu yang direifikasi dalam pikiran publik. Menurutnya suatu partai dapat sangat dilembagakan namun tidak perlu independensi kelompok lain (Janda, 1980a). Tentu Kenneth Janda mengesampingkan tingkat otonomi yang tinggi. Morlino (1996:23) sendiri menunjukkan penilaian pesimis bahwa kemampuan adaptasi maksimum secara bersamaan dengan kompleksitas serta koherensi dan otonomi maksimum tampaknya hampir mustahil dilakukan dalam suatu bentuk pelebagaan (Randall & Svåsand, 2002).

Pendapat Levitsky selanjutnya bahwa, perlu membedakan aspek kesisteman dan 'infus nilai', dua dimensi ini tidak harus berjalan bersama. Partai bisa tinggi atau rendah pada keduanya, tetapi mungkin juga ada partai yang kuat pada 'infus nilai' tetapi rendah pada kesisteman (rutinisasi organisasi) dan mungkin sebaliknya. Sementara Kenneth Janda yang secara tegas memisahkan pelebagaan sistem kepartaian dengan pelebagaan partai politik (masing-masing partai), memberikan argumentasi bahwa partai yang dilembagakan adalah partai yang ditegaskan kembali di benak publik (Randall & Svåsand, 2002:7).

Vicky Randall dan Lars Svasand (2002) telah merangkum perdebatan-perdebatan tingkat pelebagaan partai politik dengan memberikan empat ukuran tingkat pelebagaan partai politik, yaitu; Kesisteman, Otonomi Keputusan, 'Infus Nilai', dan Reifikasi. Argumen utama mereka adalah pelebagaan partai politik dipahami sebagai proses pemantapan partai politik baik dalam wujud perilaku yang berpola maupun dalam sikap atau budaya yang terintegrasi.

Pada dimensi ‘Infus Nilai’, Randall dan Svasand memiliki argumen semakin banyak anggota partai dan pendukungnya mengidentifikasi partai sebagai fenomena ekspresif, dan semakin tinggi tingkat loyalitas pemilih, maka partai semakin dilembagakan. Otonomi, partai yang sepenuhnya bergantung pada faktor-faktor eksternal kurang dilembagakan daripada faktor di mana pelestarian organisasi bukan karena faktor-faktor eksternal (Randall & Svåsand, 2002:10). Adaptabilitas, partai tidak bisa dikatakan dilembagakan jika tidak mampu bertahan seiring berjalannya waktu (Randall & Svåsand, 2002:11).

Matthias Basedau dan Alexander Stroh (2008) telah mengakui kontribusi Randall dan Svasand dalam sulitnya menyepakati pelembagaan partai yang diargumentasikan oleh para scholar sebelumnya. Namun Basedau menilai konsep Randall tidak dilakukan pengujian, dan cenderung menghindari kesulitan yang muncul dari penerapan praktis konsep pelembagaan partai yang rumit ke dalam kasus nyata. Basedau dan Stroh memodifikasi empat dimensi pengukuran oleh Randall dan Svasand, karena menurutnya reifikasi yang diajukan oleh Randall sebetulnya telah termasuk ke dalam ‘infus nilai’. ‘Infus nilai’ berarti bahwa sebagian orang yang relevan (anggota partai dan pemilih) melihat partai sebagai organisasi yang tidak boleh ditinggalkan (Basedau & Stroh, 2008:8). Empat dimensi yang Basedau dan Stroh masukan yaitu: Akar dalam Masyarakat, Level Organisasi, Otonomi, dan Koherensi.

Basedau dan Stroh menerangkan keempatnya yaitu: (a) Partai memiliki akar yang stabil dalam masyarakat, (b) Terdapat perangkat organisasi yang selalu ada di semua tingkat administrasi dan bertindak sesuai kepentingan partai, (c) Terlepas dari akar sosialnya partai relatif independen dari individu maupun kelompok di dalam dan di luar partai, dan (d) Partai bertindak sebagai organisasi yang bersatu dan toleransi terhadap perselisihan intra-partai tertentu.

Mereka berdua memiliki argumen bahwa pelembagaan partai adalah proses bagi masing-masing partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan mengalami peningkatan atau stabilitas dan nilai organisasi. Mereka mengajukan tiga hal mengenai prinsip-prinsip umum untuk mengukur pelembagaan partai yaitu; Pertama, mengukur pelembagaan partai secara terpisah dari sistem partai. Kedua, pelembagaan partai yang meliputi organisasi, pada dasarnya adalah tentang peningkatan stabilitas dan pemasukan nilai. Ketiga, organisasi harus melembagakan sehubungan dengan hubungan internal dan eksternal mereka. Pelembagaan partai ini juga harus dilakukan di semua level (Basedau & Stroh, 2008; Khikmawanto, 2021).

III. TEORI

Teori yang akan digunakan terhadap studi Partai NasDem secara khusus adalah teori Matthias Basedau dan Alexander Stroh (2008). Menurut mereka pelembagaan partai dipahami sebagai proses yang mana masing-masing partai politik berpartisipasi dalam pemilihan mengalami peningkatan atau stabilitas dan nilai organisasi.

Pertama, “dimensi akar dalam masyarakat” dimasukan untuk menstabilkan organisasi secara eksternal. Kedua, dalam hal level organisasi partai yang lebih terlembaga harus menunjukkan tingkat organisasi yang lebih tinggi. Ketiga, Otonomi diperlihatkan dengan tidak terdapat personal yang mengontrol partai sewenang-wenang. Keempat, Koherensi berkaitan dengan perilaku anggota atau kader partai yang setia terhadap organisasi partai.

Gambar 1. Dimensi Pelembagaan Partai Menurut Basedau dan Stroh

Dimension	Stability	Value-Infusion
External	Roots in Society	Autonomy
Internal	Level of Organization	Coherence

Sumber: Matthias Basedau and Alexander Stroh, 2008

Matthias Basedau dan Alexander Stroh mengajukan lima belas indikator untuk menganalisis tingkat pelembagaan partai politik. Indikator ini merupakan hasil kompilasi yang dikembangkan dari literatur sebelumnya.

Mereka menjelaskan bahwa pertama, partai politik yang dilembagakan dengan baik harus memiliki akar yang stabil di masyarakat. Kedua, partai politik harus menyeimbangkan akar dalam masyarakat dengan otonomi mereka sebagai organisasi. Ketiga, keorganisasian ditunjukkan dengan seberapa banyak keanggotaan formal dan aktivitas keorganisasian partai. Keempat, koherensi suatu partai politik mensyaratkan walaupun terdapat perbedaan organisasi, partai politik masih dapat bertindak sebagai organisasi yang bersatu.

IV. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena cocok untuk meneliti kasus partai secara individu, dengan memadukan penelitian pustaka dan studi lapangan. Proses penelitian kualitatif sebagian besar bersifat induktif (Creswell, 2014:32 & 38). Menurut Lowndes (et al., 2018:185) peneliti cenderung menggunakan bukti kualitatif dan menawarkan hasilnya sebagai salah satu interpretasi terhadap hubungan antar fenomena sosial yang dipelajari.

Fokus penelitian adalah memberikan jawaban yang terperinci dan berdasarkan teks yang sering bersifat historis dan mencakup pengamatan politik (Lowndes et al., 2018:237). Peneliti ini memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara simultan (Neuman, 2014). Tahap-tahap pengumpulan data dilakukan dengan menentukan batasan penelitian, pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi, dokumen, dan materi visual, serta menetapkan protokol untuk merekam informasi (Creswell, 2014:239).

Untuk meningkatkan derajat validitas digunakan triangulasi data (Creswell, 2014:259). Triangulasi merupakan metode yang hampir bersifat “ajimat” untuk mengkonfirmasi temuan. Triangulasi data digunakan untuk menemukan validitas dari data yang dikumpulkan. Hal ini dikarenakan bias data yang wajar terjadi, sehingga perlu mengoreksinya dengan membaca sumber lain. Sekalipun suatu peristiwa tidak kontroversial, peristiwa itu akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda oleh pengamat yang berbeda pula (Miles & Huberman, 1984, hal. 266–267).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelembagaan dalam Praktik Stabilitas Partai NasDem

Dimensi Akar dalam Masyarakat

(1) Indikator pertama melakukan penghitungan usia Partai NasDem terhadap kemerdekaan, jelas sangat jauh dari 1945 ke 2011 (Sejarah NasDem, 2024; Sejarah Partai NasDem, 2023) berjarak 66 tahun. (2) Usia partai terhadap periode awal multipartai dari 1999, jadi jika dihitung dengan berdirinya Partai NasDem pada 2011 berjarak 12 tahun.

Namun perlu dicatat Partai NasDem merupakan sempalan dari Partai Golkar (Yunarto dalam Perdana, 2012:116; Aprimayanti, 2021:52) terutama Surya Paloh sendiri sebagai Ketua Umum adalah politisi senior di Golkar, sebelumnya. Partai NasDem jelas telah memanfaatkan jejaring Partai Golkar dibuktikan dengan banyaknya pengurus Partai NasDem yang merupakan mantan pengurus Partai Golkar (Yunarto dalam Perdana, 2012:100). Tidak lupa sejarahnya sebagai Ormas NasDem yang pada awal deklarasinya pada 1 Februari tahun 2010 terdiri dari 45 tokoh nasional termasuk Surya Paloh dan Sri Sultan HB IX (Siswono, 2022:56; Upara, 2016:81). Nama-nama lain seperti Khofifah Indra Prawansa, Anies Baswedan, Ahmad Syafii Maarif, Budiman Sudjatmiko, dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Dengan infrastruktur politik

yang memadai, jejaring Golkar dan Ormas NasDem, Partai NasDem di awal keikutsertaannya langsung lolos ke Senayan. Hasilnya, pada Periode Pemilu 2014 langsung lolos ke Senayan, dan Pemilu 2019 mengalami kenaikan.

(3) Hubungan dengan organisasi masyarakat sipil telah terbentuk sebelumnya seperti: Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Advokasi Hukum, dan Petani NasDem). NasDem juga menjalin komunikasi dengan Ormas terbesar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah (interview dengan Choirie, 2024; Komarudin, 2024; Zaki, 2024). Sebagai perbandingan, menjelang Pemilu 2014 sebenarnya ada partai baru yang ingin dibentuk yaitu partai PPN, partai tersebut bahkan adalah gabungan dari 12 partai kecil lainnya (Savitri, 2011). Namun Partai PPN ini tidak bernasib mulus seperti Partai NasDem.

(4) Perubahan dukungan pemilih pada dua pemilu (2014 dan 2019) Partai NasDem mengalami peningkatan suara sebesar 2,31%. Hal ini berkaitan dengan indikator hubungan ke organisasi masyarakat sipil terutama kinerja dilakukan oleh anggota partai yang mencalonkan diri. Dalam hasil penelitian Intje Supriadi Indama dkk (2019) di Kabupaten Banggai, hubungan dengan komunitas tertentu atau organisasi masyarakat sipil cukup berhasil meningkatkan perolehan suara para caleg (calon legislatif). Di Partai NasDem sendiri, seperti Saan Mustopa telah merawat pemilih melalui jejaring komunitas salah satunya komunitas bola volly, menyediakan program beasiswa kuliah, bantuan rumah tidak layak huni, dan penyediaan layanan kesehatan (Observasi, 2023).

Persoalannya, dengan usia partai yang relatif baru Partai NasDem sebenarnya belum memiliki akar dalam masyarakat yang kokoh dibandingkan dengan partai-partai lain yang telah lama ada seperti PDIP dan Golkar (interview dengan Choirie, 2024; Komarudin, 2024; Zaki, 2024). Partai-partai politik baru dinilai belum memiliki akar dalam masyarakat yang kuat sehingga memerlukan figur populer untuk meningkatkan perolehan suara (Barokah et al., 2022; interview dengan Choirie, 2024). Kondisi Partai NasDem ini diakui sendiri oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G. Plate sebelumnya bahwa Partai Nasdem sebagai partai baru belum memiliki basis elektoral yang kokoh sehingga butuh ketokohan kuat untuk meningkatkan perolehan suara (Rahayu, 2019). Pernyataan Sekjen NasDem tersebut dapat dibenarkan jika memperhatikan penurunan perolehan suara Partai NasDem di beberapa daerah provinsi yaitu; Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Banten (Data KPU, 2019).

Dimensi Otonomi

(5) Pergantian kepemimpinan di Partai NasDem sampai tahun 2019 terjadi sekali pergantian kepemimpinan setelah sebelumnya diketuai oleh Patrice Rio Capella, yang pada kongres pertama Januari 2013 Surya Paloh terpilih menjadi ketua umum (*Partai NasDem*, 2024). Perihal pergantian kepemimpinan ini pernah terjadi konflik yang mana Hary Tanoe menolak Surya Paloh menjadi ketua umum partai, dan berujung HT keluar dari Partai NasDem. Selanjutnya pasca-Pemilu 2019, pada kongres kedua 8 November 2019, Surya Paloh kembali terpilih sebagai ketua umum (Ihsanuddin & Meiliana, 2019). (6) Di bawah kepemimpinan Surya Paloh Partai NasDem berhasil mengalami perubahan perolehan suara yang positif. Peningkatan perolehan suara NasDem adalah paling tinggi dibandingkan dengan partai-partai lain.

Pada awal pembentukan Partai NasDem memberikan kebebasan kepada kelompok yang menolak Ormas Nasdem menjadi Partai Politik. Beberapa tahun setelahnya, otonomi keputusan Partai NasDem terlihat dalam dinamika kontestasi politik yang menolak kenaikan syarat dukungan calon independen untuk Pilkada 2017. Hal itu karena Partai NasDem menilai kenaikan syarat berpotensi membatasi calon kepala daerah (Christie, 2016). Padahal saat itu fenomena Calon Independen dianggap menakutkan bagi partai politik (Erdianto, 2016). (7) Ini telah menunjukkan independensi otonomi keputusan partai. Namun di sisi lain Partai NasDem juga menunjukkan otonomi keputusan yang bermasalah.

Misalnya, pada kasus yang terjadi di daerah, di tingkat DPC kurang otonom dalam menentukan keputusannya (Choirie, 2024; Komarudin, 2024). Konflik mengenai wakil ketua dewan DPRD Lombok Barat; DPC mendukung Agus sementara DPP mendukung dan memutuskan Multazam sebagai wakil ketua dewan (Radarlombok.co.id, 2016). Tentu dalam hal ini Partai NasDem di tingkat pusat telah membatasi otonomi keputusan partai di tingkat daerah. Hal ini bertentangan dengan konsep pelembagaan yang mesti dilakukan di semua level. Artinya, partai di level daerah juga harus memiliki otonomi keputusan yang independen.

Indikator berikutnya, (8) Apresiasi Populer ditunjukkan Partai NasDem terhadap situasi maraknya praktik mahar politik yang dinilai buruk. Partai NasDem sendiri mengambil langkah dengan mengusung politik tanpa mahar (Choirie, 2024; Suditomo, 2024). Langkah ini mendapatkan apresiasi dari sejumlah politisi dan membuat mereka tertarik untuk bergabung ke Partai NasDem. Seperti Ridwan Kamil (Maret, 2018) yang berpendapat langkah politik tanpa mahar Partai NasDem perlu dijadikan panutan (nasdem.id, 2019). Contoh berikutnya, pada Pilkada DKI 2017 (Putra, 2018) Ahok yang awalnya tidak mau mencalonkan diri menjadi Gubernur karena persoalan mahar politik, akhirnya menunjukkan apresiasinya dengan mau mencalonkan diri setelah mendapat dukungan dari Partai NasDem. Juga seperti Syahrul Yasin Limpo yang pindah ke Partai NasDem dengan salah satu alasannya adalah karena konsep politik tanpa mahar yang diusung oleh Partai NasDem (Putri, 2018). Akumulasi dari langkah politik tanpa mahar Partai NasDem dapat dilihat dari Pilkada 2020. Hasilnya pada Pilkada 2020 Partai NasDem memperoleh kemenangan mencapai 59,46% (jateng.nasdem.id, 2023). Kemenangan ini menunjukkan langkah politik Partai NasDem telah menarik apresiasi dari berbagai pihak. Bahkan politik tanpa mahar ini telah banyak menarik perhatian kalangan selebritis untuk bergabung (Lukihardianti, 2018), dan mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif.

Persoalannya, di satu sisi apresiasi populer yang dilakukan oleh Partai NasDem berdampak menguntungkan bagi partai, di sisi lain juga memiliki konsekuensi yang dinilai akan merugikan. Dengan cara-cara menunjukkan apresiasi seperti itu Partai NasDem tidak memiliki hubungan emosional yang kuat dengan tokoh yang diusung (Choirie, 2024; Komarudin, 2024), yang mana cara ini juga dilakukan Partai NasDem dalam Pemilu Legislatif (Paath, 2019). Orang-orang yang diusung dinilai sangat rentan terjadi ketidaksesuaian dengan kepentingan partai. Persoalan ini dapat menunjukkan derajat koherensi yang bermasalah. Contohnya adalah Ferry Mursidan Baldan (Hakim & Krisiandi, 2018), yang sebelumnya menjadi Menteri ATR dari Partai NasDem, kemudian pada 2018 telah vakum dan mendukung Prabowo-Sandi menjelang Pilpres 2018. Tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan Partai NasDem yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Bahkan di Aceh (Redaksi, 2019), Ketua DPW Partai NasDem, Zaini Djalil, mengaku pasca-Pemilu 2019 banyak kader partai yang telah pindah ke partai lain.

Dimensi Tingkat Keorganisasian

(9) Kekuatan keanggotaan Partai NasDem menunjukkan anggota partai dari berbagai latar belakang seperti: mantan politisi dari partai lain (politisi senior), orang kuat di daerah, dan kalangan selebritis yang populer. Tercatat pada kalangan Pengusaha/Pekerja/Wiraswasta

sejumlah 315 Calon Legislatif, Petahana/Mantan Anggota DPR/DPRD 66 Calon Legislatif, dan dari kalangan selebritis sejumlah 37 sampai 45 Calon Legislatif (G2arnesia, 2109; Iqbal & Teresia, 2018; Sary Sakti et al., 2020). Pada Pemilu 2019 dari kalangan selebritis yang mendapat Kursi DPR adalah Muhammad Farhan (Damanik, 2018).

Kekuatan keanggotaan lainnya ada Fauzi Amro di Sumatera Selatan (dapil 1) yang merupakan mantan kader Partai Hanura. Ada juga Percha Leanpuri (3 Caleg Terpilih Partai NasDem, 2019; RMOLSUMSEL, 2019; Tambak, 2019) yang memperoleh suara paling banyak, 124.047 suara. Dia sendiri merupakan anak dari Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023, Darman Deru (Budi, 2021). Diketahui perolehan suara Partai NasDem di provinsi tersebut bertambah 7%, dari 7% (277.404) pada 2014 menjadi 14% (581.381) suara pada 2019. Dapat dikatakan mereka adalah orang-orang kuat di daerahnya.

Kemudian terdapat H. Rusdi Masse Mappasessu yang memperoleh suara paling banyak sejumlah 119.064 suara dibandingkan calon lainnya di Sulawesi Selatan, (Rusdi Masse Mappasessu, 2019; 2024; Saputra, 2023; Rusdi Masse Mappasessu, 2019b). Dia juga merupakan mantan Bupati Sidenreng Rappang dari 2008 hingga 2018, sekaligus ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016).

Terdapat Rahmad Gobel dengan perolehan suara 146.067 di Gorontalo. Rahmad Gobel sendiri merupakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada Tahun 2014-2015, komisaris dan direktur berbagai perusahaan, dan latar belakang beberapa keorganisasian (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016) di Gorontalo. Dari total 34 Provinsi, secara perolehan persentase suara, di Provinsi Gorontalo memperoleh peningkatan suara yang paling tinggi. Dari hanya 3% (20.930 suara) pada 2014, menjadi 25% (167.572 suara) pada 2019, dengan perolehan 1 Kursi. Sementara pada periode sebelumnya tidak memperoleh kursi sama sekali.

Namun dalam kasus di Banten, Khususnya Banten I (Lebak dan Pandeglang), sosok seperti Hj. Tri Murni yang tidak lagi mencalonkan pada Pemilu 2019 telah berbanding lurus dengan menurunnya perolehan suara Partai NasDem di sana (BantenNews.co.id, 2023; Margaret et al., 2018; Taufiqurrohmah, 2014). Hal ini menunjukkan di satu sisi kemampuan anggota dalam menggalang dukungan telah memberikan keuntungan bagi partai (Choirie, 2024; Komarudin, 2024). Namun, di sisi lain dukungan ini menjadi tidak bertahan lama. Hal ini tentu telah menunjukkan tidak adanya kesinambungan perolehan suara dalam pemilu (Converse, 1969; S. P. Mainwaring & Scully, 1995), bagi Partai NasDem. Selain dari masalah tersebut, keanggotaan partai juga terlihat resisten tampil sebagai kader partai.

Misalnya Lucky Hakim yang mencalonkan diri menjadi DPR-RI pada Pemilu 2019 terlihat begitu tidak berani tampil sebagai kader Partai NasDem, dia lebih bermain aman tampil sebagai publik figur (Choirie, 2024; Rahayu, 2019). Pun contoh lainnya seperti Saan Mustofa (Observasi, 2023) secara jelas mengatakan: “tidak penting partainya apa, selama itu orang baik harus kita pilih”. Narasi ini tentu kurang memberi persuasi kepada pemilih untuk mendukung partai.

(10) Kongres Partai terlihat bermasalah, masa jabatan Surya Paloh telah habis pada 6 Maret 2018 (Nurita, 2018), tetapi kongres baru diadakan tahun 2019 setelah pemilu. Habisnya masa jabatan Surya Paloh yang seharusnya sudah sejak 6 Maret 2018, maka segala surat keputusan yang dikeluarkan DPP menjadi tidak sah. Tetapi, selama masa tersebut telah dikeluarkan Surat Keputusan No. 102 -SK/DPP-DPP/NasDem/IV/2018 yang ditandatangani oleh Surya Paloh pada April 2018, tentang Pengesahan Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi

Sulawesi Tengah. Juga surat keputusan yang sama dengan nomor 128 tentang perubahan susunan pengurus Partai NasDem Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara.

(11) Sumber Daya Material masih banyak mengandalkan bantuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang sumber dananya sebagian besar dari ketua umum (Aliyudin, 2013; Choirie, 2024; Komarudin, 2024; Zaki, 2024). Dalam berbagai literatur seperti Sergiu Gherghina (2015), ketergantungan pendanaan partai telah berakibat pada peran dominan yang dimainkan oleh pemberi dana, salah satunya dalam pengambilan keputusan partai (Choirie, 2024; Komarudin, 2024).

Pemeran dominan dalam partai ini seringkali memiliki cap sebagai Elite Partai. Penelitian Amanah Upara (Upara, 2016:182) telah menunjukkan bahwa menjelang kongres pertama Partai NasDem 2013 terdapat desakan dari Surya Paloh kepada para ketua DPW Partai NasDem untuk memberikan surat dukungan kepadanya. Hal lain mengenai peran dominan yang dimainkan oleh Elite Partai NasDem adalah mengenai keputusan mengusung Anies Baswedan dalam pencalonan presiden 2024 (Anindita et al., 2022). Keputusan ini mengakibatkan beberapa kader Partai NasDem memutuskan untuk hengkang (Aditya & Rastika, 2022; CNN Indonesia, 2022; Tim Redaksi detik.com, 2022). Peran dominan yang dipersonalisasi menunjukkan partai belum terlembaga, hal ini sering berimbas pada konflik internal partai (Bakar, 2013:111-113).

(12) Kehadiran organisasi nasional dan kegiatan di luar kampanye dapat dicontohkan di Kabupaten Gunungkidul Partai Nasdem mengadakan kegiatan kesenian agar masyarakat lebih mengenal Partai NasDem dan menyatukan dukungan. Kegiatan dihadiri para petinggi Partai Nasdem dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Perwakilan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Contoh kedua, kegiatan di luar kampanye adalah Partai NasDem pernah meluncurkan aplikasi Al-Quran Digital (Ariyanthi, 2017; Wibowo, 2017). Kemudian Pelantikan Jajaran DPD Partai NasDem di Kabupaten Rote Ndao (*Victor Laiskodat Lantik Jajaran DPD Partai NasDem Rote Ndao*, 2017). Namun dari temuan Panca Haqiqi (2014) kegiatan Partai NasDem di daerah kurang begitu terlihat selain hanya menjelang pemilu.

Dimensi Koherensi

(13) Belum terdapat pembelotan dan penyeberangan dari kelompok parlementer yang berarti mengganggu terhadap internal partai. Adapun kasus kelompok anggota parlemen yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan partai pernah terjadi di tingkat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Hal tersebut mengenai perbedaan RAPBD (Rancangan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah) di Pemerintahan Gubernur Ahok dengan RAPBD di DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya Partai NasDem telah mengambil sikap bagi para kadernya yang duduk di DPRD DKI Jakarta untuk tidak menggunakan hak angket dalam masalah ini. Namun DPRD mengajukan hak angket yang termasuk di dalamnya anggota legislatif dari Partai NasDem. Dalam laporan Bayu Hermawan (2015) Sekretaris DPP Partai NasDem, Rio Capella kala itu akan memberi sanksi pencopotan anggotanya yang duduk di DPRD DKI Jakarta jika tidak segera mencabut hak angket atas kasus ini.

Kasus mengenai hak angket ini menunjukkan adanya keharusan para anggota berperilaku sesuai kepentingan partai di dalam pemerintahan (Choirie, 2024; Komarudin, 2024). Tetapi di sisi lain menunjukkan para anggota yang duduk di lembaga legislatif kurang otonom. Contoh

lain yang menunjukkan adanya masalah dalam dimensi koherensi adalah kasus Ferry Mursidan Baldan yang telah disebutkan sebelumnya pada Dimensi Otonomi.

Berikutnya, mengenai (14) hubungan moderat antara pengelompokan intra-partai atau dengan kata lain diistilahkan dengan faksionalisme, pernah terjadi di tahun 2013 (seperti yang telah disebutkan pada dimensi otonomi), yang setidaknya pengikut HT juga ikut keluar dari Partai NasDem. Misalnya; Sekretaris Jenderal Partai NasDem Ahmad Rofiq, Wakil Sekretaris Jenderal NasDem Saiful Haq, dan Ketua Internal DPP Endang Tirtana, dan para kader loyalis Hary Tanoesoedibjo di Partai NasDem (Leonarda Johaness R.S., 2013). Terdapat juga pada 2018, kader Partai Nasdem, Kisman Latumakulita, menggugat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem ke Mahkamah Partai NasDem. Alasannya karena sesuai AD/ART dan Kongres tahun 2013, Surya Paloh dinilai sudah habis masa jabatannya pada 6 Maret 2018 (Nurita, 2018).

Adapun (15) toleransi terhadap pembangkangan intra-partai pernah terjadi dalam kasus DPP Garda Pemuda NasDem mendukung Surya Paloh menjadi ketua umum, namun Saepul Haq sebagai ketua Garda Pemuda NasDem DKI menolak Surya Paloh, malah mendukung HT jadi Ketua Umum. Kejadian ini berimbas pada pemecatan Saepul Haq dari ketua Garda Pemuda NasDem tersebut. Artinya Partai NasDem kurang memberi toleransi dalam kasus ini.

Gambaran lain di tingkat daerah, memang sudah terdapat permasalahan mengenai koherensi di DPD Tanjung Pinang (Yudistira, 2014), konflik tentang Jabatan yang dinilai nepotisme, Rekrutmen Bacaleg (Bakal calon legislatif) yang dinilai tidak sesuai AD/ART sampai menimbulkan demo dari sayap partai, dan Penentuan Nomor Calon yang tidak sesuai AD/ART sampai terjadi pengunduran diri dari Partai NasDem.

B. Mengajukan Komponen “Kemampuan Kompromi” sebagai Jalan Tengah

Terdapat dua kelompok kalangan sarjana yang meneliti tentang pelebagaan partai politik. Kelompok pertama adalah kelompok yang meneliti pelebagaan partai dengan memisahkannya dari sistem kepartaian (Larry, 1988; S. P. Mainwaring & Scully, 1995; Merkel, 1996). Kelompok kedua melakukan pemisahan antara partai politik dan sistem kepartaian (Dix, 1992; Janda, 1980b; Panebianco, 1988; Randall & Svåsand, 2002). Kedua kelompok sarjana telah berkontribusi dalam perdebatan konsep pelebagaan partai. Namun sejauh ini belum ada kesepakatan yang pakem tentang bagaimana hubungan antar dimensi. Pernyataan Levitsky (1988:641) mungkin yang paling memicu sebuah dilema dalam perdebatan ini.

Perdebatan tentang pelebagaan partai seperti perdebatan tentang kemampuan adaptasi cenderung mengabaikan otonomi keputusan partai, kesisteman yang terlalu rigid menghambat kemampuan adaptasi partai. ‘Infus nilai’ yang juga terabaikan ketika partai dipaksa harus beradaptasi, menunjukkan belum adanya solusi dari perdebatan antardimensi ini, belum adanya penyusunan dimensi mana yang lebih penting dan mana yang bukan prioritas dalam kondisi tertentu. Menurut Levitsky (1988:641) bahwa partai mungkin sangat terlembaga di satu dimensi namun saat yang bersamaan kurang terlembaga di dimensi yang lain.

Levitsky membedakan ‘infus nilai’ dan kesisteman, dia mengutip kasus partai Peronis Argentina (Partido Justicialista, PJ) yang pada perhitungannya skor tinggi pada langkah-langkah ‘infus nilai’ tetapi aturan dan prosedur telah diabaikan, dimanipulasi, dan diperebutkan (Levitsky, 1988; Randall & Svåsand, 2002).

Vicky Randall dan Lars Svasand (2002) telah melakukan kajian pelebagaan partai politik di negara-negara demokrasi Dunia Ketiga. Umumnya pelebagaan partai politik di negara-negara Dunia Ketiga cenderung lemah. Hal tersebut dipengaruhi oleh identifikasi agama, etnis tradisional, sumber daya termasuk akses jaringan dan pendanaan, terkonsentrasi pada kepemimpinan daripada pelebagaan (personalistik), faksionalisasi yang bersumber dari klientelisme politik, dan transisi yang singkat mengakibatkan partai-partai yang baru berdiri kurang dilebagaan.

Dalam kajian Mainwaring (1995) yang menarik konsep pelebagaan partai politik pada fenomena electoral volatility menyebutkan terdapat dua faktor penjelasan tentang terjadinya pergeseran pemilu. Pertama, faktor sosiologi politik, yang berargumen bahwa pembentukan dan persaingan partai berlangsung dalam berbagai garis perpecahan mulai dari usia, pendidikan, atau latar belakang profesi hingga agama, etnis, dan kelas sosial. Kedua, mengenai kohesi, Mainwaring menilai ada celah yang belum dapat di jelaskan mengenai perpecahan yang menyebabkan terjadinya electoral volatility. Sehingga dia mengusulkan kerangka kerja kelembagaan partai politik untuk menjelaskan electoral volatility. Pada tingkat partai, electoral volatility bukanlah semata-mata hasil dari proses umum seperti demokratisasi, kinerja ekonomi, atau kerangka elektoral (S. P. Mainwaring & Scully, 1995).

Mainwaring (1995) dan Beller & Belloni (1978), kepemimpinan personalistik cenderung negatif karena persaingan diantara mereka dapat memicu faksionalisasi, sehingga terjadinya kohesi dalam partai politik. Celah ini dapat dipandang secara positif dimana dengan membentuk komitmen elit partai, kepemimpinan personalistik dapat menjadi peluang pematangan pelebagaan partai politik.

Aktor di luar partai yang telah digambarkan memiliki kecenderungan dinilai mengancam otonomi keputusan partai. Hal ini perlu dikaji ulang karena di sisi lain aktor di luar partai dapat memberikan sumber dana finansial yang digunakan dalam pendanaan partai politik. Terakhir dan paling penting adalah, belum adanya kesepakatan sebab akibat dalam keterhubungan antardimensi pelebagaan partai politik menimbulkan masih tumpang-tindihnya argumen-argumen terkait pelebagaan partai politik. Misalnya, apakah dengan derajat kesisteman yang tinggi, para aktor partai akan meresapi nilai-nilai dalam partai, ataukah dengan derajat 'Infus Nilai' yang tinggi para aktor akan dengan sadar mentaati segala prosedur yang ditetapkan dalam kesisteman partai.

Pada sebuah studi yang dilakukan terhadap kasus Partai NasDem, telah ditemukan suatu jalan tengah untuk terhindar dari dilema tersebut. Demi stabilitas dan keberlangsungan partai, dan proses meningkatkan pelebagaan terus berjalan maka partai perlu memiliki "Kemampuan Kompromi" yang berguna untuk menyeimbangkan antar dimensi.

VI. KESIMPULAN

Perdebatan tentang konsep pelebagaan partai politik masih sulit menemukan kesepakatan, dan masih menjadi sebuah dilema. Sementara, dengan alasan apapun tidak dapat dibantah bahwa tingkat pelebagaan yang rendah pada dimensi yang manapun berdampak terhadap kestabilan dan keberlangsungan partai. Kehendak mencapai stabilitas dan keberlangsungan akan selalu menuntut partai untuk terus meningkatkan pelebagaan.

Dalam kasus Partai NasDem memperlihatkan bahwa: sosok-sosok personal yang populer, sumber daya yang dimiliki anggota, telah berkontribusi besar bagi stabilitas dan

keberlangsungan partai. Namun tampaknya anggota partai juga belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dengan baik. Agar diri mereka dapat menyatu dengan nilai-nilai dan kehendak partai maka perlu meningkatkan pelebagaan partai, dana agar proses meningkatkan pelebagaan partai dapat menghadapi suatu kondisi yang dilematis menghadapi antar dimensi, maka partai penting memiliki “kemampuan kompromi”.

Ucapan Terimakasih

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Republik Indonesia yang telah mendanai studi dan penelitian saya.

Badan Pendanaan dan Pemberi Hibah

Penelitian ini didukung oleh program pemerintah melalui LPDP. Lembaga ini berada dibawah kementerian keuangan yang dimotori oleh Ibu Sri Mulyani.

Rincian Penulis

Penulis merupakan penerima beasiswa LPDP, dan saat ini sedang melakukan studi akhir Program Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- 3 *Caleg Terpilih Partai NasDem.* (2019).
<https://www.kabarsriwijaya.com/2019/05/10/fauzi-amro-melenggang-lagi-ke-senayan/>
- Aditya, N. R., & Rastika, I. (2022). *Dua Kader Mundur Setelah Nasdem Deklarasi Anies Capres, Waketum: Ini Seleksi Alam.*
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/16071341/dua-kader-mundur-setelah-nasdem-deklarasi-anies-capres-waketum-ini-seleksi>
- Aliyudin, A. (2013). Political Marketing Partai Politik Baru Menuju Pemilu 2014 : Studi kasus Pemenangan Partai Nasdem. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 1(4), 213. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20300780-T30366-Inco Hary Perdana.pdf>
- Anindita, L., Jasit, M. G., & Asrinaldi. (2022). DOMINASI ELITE DALAM FUNGSI REKRUTMEN POLITIK (ANALISIS TERKAIT PENCALONAN ANIES BASWEDAN SEBAGAI CALON PRESIDEN OLEH PARTAI NASDEM). *Concept and Communication*, null(23), 301–316.
<https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Aprimayanti, R. (2021). *Fenomena Party Switching Caleg Petahan di Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada Pileg 2019*. Universitas Indonesia.
- Ariyanthi, R. K. (2017). *Partai Nasdem Luncurkan Aplikasi Alquran Digital.*
<https://wartaekonomi.co.id/read142632/partai-nasdem-luncurkan-aplikasi-alquran-digital>
- Bakar, A. (2013). Politik dinasti dan pelebagaan partai politik. *Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, 1(2), 105–119.
- BantenNews.co.id. (2023). *NasDem Banten Target 4 Kursi DPR RI, Ada Nama Mantan Gubernur Hingga Walikota*. NasDem Banten Target 4 Kursi DPR RI, Ada Nama Mantan Gubernur Hingga Walikota
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Political Disruption: Opportunities and Challenges of New Political Parties Ahead of the 2024 Election. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Basedau, M., & Stroh, A. (2008). Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.1119203>
- Beller, D. C., & Belloni, F. P. (1978). Party and faction: modes of political competition. *Faction politics: Political parties and factionalism in comparative perspective*, 417–450.
- Budi, C. S. (2021). *Profil Percha Leanpuri, Anak Gubernur Sumsel yang Meninggal Pasca-melahirkan, Pernah Jadi Anggota DPD Termuda.*
<https://regional.kompas.com/read/2021/08/20/154901378/profil-percha-leanpuri-anak-gubernur-sumsel-yan-g-meninggal>
- Christie, S. (2016). *NasDem Tolak Kenaikan Syarat Dukungan Calon Independen.*
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160315134653-32-117528/nasdem-tolak-kenaikan-syarat-dukungan-calon-independen>
- CNN Indonesia. (2022). *Deretan Kader NasDem Mundur Usai Anies Dideklarasikan Jadi Capres.*

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221006124753-617-857068/deretan-kader-nasdem-mundur-usai-anies-dideklarasikan-jadi-capres>
- Converse, P. E. (1969). Of time and partisan stability. *Comparative political studies*, 2(2), 139–171.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publication, Inc.
- Damanik, C. (2018). *Artis Daftar Jadi Caleg NasDem di Jawa Barat*. <https://regional.kompas.com/read/2018/07/17/09163811/10-artis-daftar-jadi-caleg-nasdem-di-jawa-barat-farhan-hingga-olla-ramlan?page=all>
- Data BPS. (2019). *Suara Parpol Nasional*.
- Dix, R. H. (1992). Democratization and the institutionalization of Latin American political parties. *Comparative Political Studies*, 24(4), 488–511.
- Drummond, A. J. (2006). Electoral volatility and party decline in western democracies: 1970-1995. *Political Studies*, 54(3), 628–647. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2006.00617.x>
- Erdianto, K. (2016). *Fenomena Calon Independen Dianggap Menakutkan bagi Parpol*. <https://nasional.kompas.com/read/2016/03/22/17025601/Fenomena.Calon.Independen.Dianggap.Menakutkan.bagi.Parpol>
- Garnesia, I. (2109). *Benarkah Caleg Selebritas Bantu NasDem Dongkrak Suara Pileg*. <https://tirto.id/benarkah-caleg-selebritas-bantu-nasdem-dongkrak-suara-pileg-eegb>
- Gherghina, S. (2015). *Party organization and electoral volatility in Central and Eastern Europe Enhancing voter loyalty*. Routledge Research.
- Hakim, R. N., & Krisiandi. (2018). *Nasdem Sebut Ferry Mursyidan Baldan Vakum Setelah Tak Jadi Menteri*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/08/30/20444541/nasdem-sebut-ferry-mursyidan-baldan-vakum-setelah-tak-jadi-menteri>
- Haqiqi, P. (2014). *Pelebagaan Partai NasDem (Studi Kasus Pelebagaan DPD Partai NasDem Kota Surabaya dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014)*. 3(3), 422–433.
- Harmel, R., & Janda, K. (1982). Parties and their environments: limits to reform? In Longman.
- Hermawan, B. (2015). *Kader NasDem yang Dukung Hak Angket ke Ahok Bakal Dicopot*. <https://news.republika.co.id/berita/nktyg6/kader-nasdem-yang-dukung-hak-angket-ke-ahok-bakal-dicopot>
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yale University.
- Ihsanuddin, & Meiliana, D. (2019). *Kongres 2 NasDem, Surya Paloh Kemungkinan Kembali jadi Ketum*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/04/08564241/kongres-2-nasdem-surya-paloh-kemungkinan-kembali-jadi-ketum>
- Indama, I. S., Mamentu, M., & Egeten, M. M. (2019). Efektivitas Kampanye Para Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Banggai Tahun 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 5, 82–93.
- Iqbal, M., & Teresia, A. (2018). *Daftar 91 Caleg Artis DPR-RI di Pileg 2019*. <https://kumparan.com/kumparannews/daftar-91-caleg-artis-dpr-ri-di-pileg-2019-1q3BDfE9tCR/2>
- Janda, K. (1980a). *Political parties: A cross-national survey*.
- Janda, K. (1980b). *Political Parties a Cross National Survey*. The Free Press.
- JariUngu. (2019). *Rusdi Masse Mappasessu*. https://jariungu.com/caleg_2019.php?idCaleg2019=7910
- jateng.nasdem.id. (2023). *Politik Tanpa Mahar*. <https://jateng.nasdem.id/politik-tanpa-mahar/>
- Kahar, S. (2014). PENCITRAAN POLITIK PARTAI NASDEM MELALUI IKLAN DI TELEVISI Political Image of Nasdem Party Through Advertising On Television. *Suyatno Kahar JURNAL HUMANITY*, 72–84. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2395>
- Khikmawanto. (2021). PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK (Assessment derajat kesisteman Vicky Randall dan Lars Svasan pada partai Gerindra kota Tangerang). *Jurnal Mozaik*, 33–46.
- Kirchheimer, O. (1966). 6. The Transformation of the Western European Party Systems. In *Political Parties and Political Development*. (SPD-6) (hal. 177–200). Princeton University Press.
- Kopecký, P. (1995). Developing party organizations in East-Central Europe: what type of party is likely to emerge? *Party Politics*, 1(4), 515–534.
- Kuenzi, M., & Lambright, G. (2001). Party system institutionalization in 30 African countries. *Party Politics*, 7(4), 437–468.
- Larry, D. (1988). Introduction: Roots of Failure: Seeds of Hope. In *Democracy in Developing Countries*. Adamantine Press London.
- Leonarda Johanes R.S. (2013). Analisis Framing Pemberitaan Konflik Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Di Harian Media Indonesia Dan Koran Sindo. *E-Komunikasi*, 01, 10.
- Levitsky, S. (1988). INSTITUTIONALIZATION AND PERONISM The Concept, the Case and the Case for Unpacking the Concept. *Sage Jpurnal*, 4(1), 77–92.
- Lowndes, V., Marsh, D., Stoker, G., Editors, S., Peters, B. G., Pierre, J., & Stoker, G. (2018). *Political Analysis 4th Edition*. 125–141.
- Lukihardianti, A. (2018). *Saan: Banyak Artis Daftar Caleg ke Partai Nasdem Jabar*.

- <https://news.republika.co.id/berita/p81ipo428/saan-banyak-artis-daftar-caleg-ke-partai-nasdem-jabar>
- Mainwaring, S. P., & Scully, T. R. (1995). *Party Systems in Latin America*.
- Mainwaring, S., & Su, Y. P. (2021). Electoral Volatility in Latin America, 1932–2018. *Studies in Comparative International Development*, 56(3), 271–296. <https://doi.org/10.1007/s12116-021-09340-x>
- Mainwaring, S., & Torcal, M. (2005). *PARTY SYSTEM INSTITUTIONALIZATION AND PARTY SYSTEM THEORY AFTER THE THIRD WAVE OF DEMOCRATIZATION*. University of Notre Dame Press.
- Mair, P. (2008). Electoral volatility and the Dutch party system: A comparative perspective. *Acta Politica*, 43(2–3), 235–253. <https://doi.org/10.1057/ap.2008.1>
- Margaret, A., Ikasara, J., Novitasari, M., & Yolanda Panjaitan. (2018). *Potret Keterpilihan Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014*. Puskapol UI.
- Merkel, W. (1996). Institutionalisation und Konsolidierung der Demokratie in Ostmitteleuropa. *Systemwechsel 2: Die Institutionalisierung der Demokratie*, 73–112.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. In *Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods* (hal. 263).
- Morlino, L. (1996). Democracy Between Consolidation and Crisis. In OXFORD. http://books.google.com.tw/books?id=NF9umgEACAAJ&dq=intitle:Oxford+Studies+in+Democratization&hl=&cd=1&source=gbs_api
- nasdem.id. (2019). *Politik Tanpa Mahar NasDem Teladan untuk Semua*. <https://nasdem.id/2019/03/28/politik-tanpa-mahar-nasdem-teladan-untuk-semua/>
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Limited.
- North, D. C. (1993). INSTITUTIONS AND CREDIBLE COMMITMENT. *Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology*, 1, 1–24.
- Nurazizah, N., Usman, J., & Prianto, A. L. (2015). Kaderisasi Partai Nasdem Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Maros. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 78–90. <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i1.110>
- Nurita, D. (2018). *Kader NasDem Gugat Jabatan Ketua Umum Surya Paloh*. <https://nasional.tempo.co/read/1139888/kader-nasdem-gugat-jabatan-ketua-umum-surya-paloh>
- Paath, C. K. (2019). *Nasdem Selalu Selangkah di Depan, tetapi Ini Kelemahannya*. <https://www.beritasatu.com/news/584809/nasdem-selalu-selangkah-di-depan-tetapi-ini-kelemahannya>
- Panebianco, A. (1988). *Political parties: organization and power*. CUP Archive.
- Partai NasDem. (2024). https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem
- Perdana, I. H. (2012). *POLITICAL MARKETING PARTAI POLITIK BARU MENUJU PEMILU 2014 UNIVERSITAS INDONESIA POLITICAL MARKETING PARTAI POLITIK BARU MENUJU PEMILU 2014 Studi Kasus: Strategi Pemenangan Partai NasDem*. Universitas Indonesia.
- Putra, E. N. (2018). *KONSEP POLITIK TANPA MAHAR PARTAI NASDEM* [UMY]. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18883?show=full>
- Putri, P. K. (2018). *Syahrul Yasin Limpo Pindah ke NasDem, Ical Banggakan Golkar*. <https://news.detik.com/berita/d-3940148/syahrul-yasin-limpo-pindah-ke-nasdem-ical-banggakan-golkar>
- Radarlombok.co.id. (2016). *Surat DPP Nasdem Batalkan Posisi Agus*. <https://radarlombok.co.id/surat-dpp-nasdem-batalkan-posisi-agus.html>
- Rae, D. W. (1971). The political consequences of electoral laws. *Yale University*.
- Rahayu, U. (2019). *Nasdem Meraup Berkah Para Artis*. <https://kumparan.com/kumparannews/nasdem-meraup-berkah-para-artis-1qyzGmIYfwF/1>
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party institutionalization in new democracies. *Party Politics*, 8(1), 5–26. <https://doi.org/10.1177/1354068802008001001>
- Redaksi, T. (2019). *Zaini Djalil Ungkap ada Kader yang Mulai 'Nakal.'* <https://beritakini.co/news/zaini-djalil-ungkap-ada-kader-yang-mulai-nakal/index.html>
- RMOLSUMSEL, T. (2019). *Suksesor Percha Leanpuri di Parlemen RI Dipastikan Irma Suryani atau Zaitun Mawardi*. <https://www.rmolsumsel.id/suksesor-percha-leanpuri-di-parlemen-ri-dipastikan-irma-suryani-atau-zaitun-mawardi>
- Rusdi Masse Mappasessu. (2024). https://id.wikipedia.org/wiki/Rusdi_Masse_Mappasessu#:~:text=H. Rusdi Masse Mappasessu (lahir,Rappang dari 2008 hingga 2018).
- Rybář, M., & Spáč, P. (2020). Social Origin Is No Destiny: Background, Institutionalization, and Electoral Performance of New Political Parties in Slovakia. *East European Politics and Societies*, 34(3), 637–662. <https://doi.org/10.1177/0888325419891222>
- Saputra, E. (2023). *Inilah Daftar Kekayaan Rusdi Masse Kalahkan Gubernur Andi Sudirman, Bandingkan dengan Latinro*. <https://makassar.tribunnews.com/2023/03/07/inilah-daftar-kekayaan-rusdi-masse-kalahkan-gubernur-andi-su>

- dirman-punya-tanah-rp23-m-di-singapura
- Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis, Volume I, by Giovanni Sartori. In *Political Science Quarterly* (Vol. 92, Nomor 4). <https://doi.org/10.2307/2148863>
- Sartori, G. (1994). *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*.
- Sary Sakti, A. M., Al-Hamdi, R., & Dwi Kurniawan, B. (2020). Strategi Kampanye Partai Nasionalis: Pengalaman Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 155–185. <https://doi.org/10.24252/profetik.v8i1a7>
- Savitri, I. (2011). *Partai Nasdem itu Ternyata Bukan Bentukan Surya Paloh*. <https://nasional.tempo.co/read/330027/partai-nasdem-itu-ternyata-bukan-bentukan-surya-paloh>
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2016). *DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA*. <https://www.dpr.go.id/blog/profil/id/1873>
- Selznick, P. (1997). Leadership in administration: a sociological interpretation. *Resources Firms and Strategies*, Oxford University Press, Oxford, 21–26.
- Siswono, A. H. P. (2022). *BRAND PARTAI POLITIK DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA (Analisis Isi Pemberitaan Medcom.id dan Liputan6.com tentang Partai NasDem pada Periode Kampanye Pemilu Serentak 2019)*. Universitas Indonesia.
- STIE STEKOM. (2019). *Rusdi Masse Mappasessu*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Rusdi_Masse_Mappasessu
- Tambak, R. (2019). *Hitungan Internal, Caleg DPR Sri Kustina Unggul Di Dapil Sumsel II*. <https://rmol.id/read/2019/04/25/387463/hitungan-internal-caleg-dpr-sri-kustina-unggul-di-dapil-sumsel-ii>
- Taufiqurrohman. (2014). *Cek di Sini Daftar 560 Anggota DPR 2014-2019*. <https://www.liputan6.com/indonesia-baru/read/2050146/cek-di-sini-daftar-560-anggota-dpr-2014-2019>
- Thoha, M. (2017). *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Prenada Media.
- Tim Redaksi detik.com. (2022). *Daftar Kader NasDem Mundur Usai Pencapresan Anies Baswedan*. <https://news.detik.com/pemilu/d-6332127/daftar-kader-nasdem-mundur-usai-pencapresan-anies-baswedan>
- Upa, A. (2016). *REKRUTMEN ELIT PARTAI PADA PEMILU 2014: STUDI KASUS DPW PARTAI NASDEM PROVINSI MALUKU UTARA*. Universitas Indonesia.
- Victor Laiskodat Lantik Jajaran DPD Partai NasDem Rote Ndao. (2017). <https://rotendaokab.go.id/victor-laiskodat-lantik-jajaran-dpd-partai-nasdem-rote-ndao.php>
- Wibowo, I. (2017). *Partai NasDem Luncurkan Aplikasi Al-Quran Digital*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/106538/partai-nasdem-luncurkan-aplikasi-al-quran-digital>
- Yudistira. (2014). Dinamika Pelembagaan Partai Nasdem TPI Menjelang Pemilu-tahun 2014. *Jurnal Umrah*, 4(1), 1–23. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>

Interview

- Wawancara dengan Ahmad Effendy Choirie, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem, 22 Juli 2024 di NasDem Tower, Jakarta.
- Wawancara dengan Moh. Arief S. Suditomo, Caleg Dapil 1 Jawa Barat Pemilu 2019 Partai NasDem, online via zoom.
- Wawancara dengan Muhammad Reza Syarifudin Zaki, Caleg Dapil IX Jawa Barat Pemilu 2019 Partai NasDem, online via WhatsApp.
- Wawancara dengan Ujang Komarudin, Pengamat Politik, 16 Juli di Margo City, Depok.

Lampiran: 15 Indikator yang diajukan Matthias Basedau dan Alexander Stroh

Dimensi	Indikator
<i>Roots in Society</i> (Akar dalam Masyarakat)	1. Usia partai terhadap kemerdekaan
	2. Usia partai terhadap periode awal multipartai
	3. Perubahan dukungan pemilih pada dua pemilu terakhir
	4. Hubungan ke organisasi masyarakat sipil
<i>Autonomy</i> (Otonomi)	5. Jumlah pergantian kepemimpinan partai
	6. Perubahan dukungan pemilih setelah pergantian kepemimpinan partai
	7. Otonomi keputusan dari individu dan kelompok
	8. Apresiasi populer terhadap pihak tertentu
<i>Level of Organization</i> (Tingkat keorganisasian)	9. Kekuatan keanggotaan
	10. Kongres regular partai
	11. Sumber daya material dan pribadi
	12. Kehadiran organisasi nasional, kegiatan di luar kampanye
<i>Coherence</i> (Koherensi)	13. Koherensi kelompok parlementer (tidak ada pembelotan dan penyeberangan)
	14. Hubungan moderat antara pengelompokan Intra-partai (tidak ada disfungsi faksionalisme)
	15. Toleransi terhadap pembangkangan intra-partai